

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESETARAAN GENDER DALAM ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA**

**Muhammad Navinza Nur Rizky<sup>1</sup>, Rafverga Rizki Setyabudi<sup>2</sup>, Indah Prabawati<sup>3</sup>, Firre An  
Suprpto<sup>4</sup>**

**Email:** [muhammadnavinza@gmail.com](mailto:muhammadnavinza@gmail.com)<sup>1</sup>, [rafverga.rizki@gmail.com](mailto:rafverga.rizki@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[indahprabawati@unesa.ac.id](mailto:indahprabawati@unesa.ac.id)<sup>3</sup>, [firresuprpto@unesa.ac.id](mailto:firresuprpto@unesa.ac.id)<sup>4</sup>

**Universitas Negeri Surabaya**

**Abstrak:** Kesetaraan gender merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan administrasi publik yang berkeadilan dan inklusif. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan kesetaraan gender di Indonesia, termasuk kerangka regulasi, strategi pelaksanaan, serta tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi dan program seperti pengarusutamaan gender, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen politik, kapasitas birokrasi, serta partisipasi masyarakat untuk mencapai kesetaraan gender secara optimal.

**Kata Kunci:** Kesetaraan Gender, Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Pengarusutamaan Gender, Indonesia.

***Abstract:** Gender equality is an important principle in the implementation of fair and inclusive public administration. This article aims to explain the implementation of gender equality policies in Indonesia, including the regulatory framework, implementation strategies, and the challenges encountered. The method used is a qualitative approach through literature review and policy analysis. The findings indicate that although Indonesia has established various regulations and programs such as gender mainstreaming, their implementation still faces structural, cultural, and institutional barriers. Therefore, strengthening political commitment, bureaucratic capacity, and community participation is necessary to achieve optimal gender equality.*

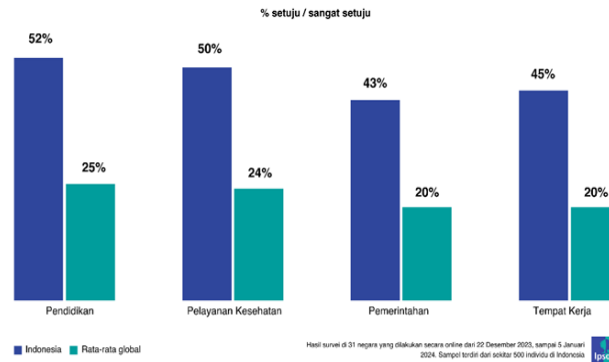
***Keywords:** Gender Equality, Public Administration, Public Policy, Gender Mainstreaming, Indonesia.*

### **PENDAHULUAN**

Kesetaraan gender merupakan salah satu agenda utama dalam pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-5 yaitu gender equality. Kesetaraan gender bertujuan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta memastikan akses dan kesempatan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan (United Nations, 2015). Dalam administrasi publik, kesetaraan gender tidak hanya berkaitan dengan representasi perempuan dalam birokrasi, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan publik mampu memberikan pelayanan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat.

Secara global, sekitar 70% masyarakat tidak memiliki preferensi tertentu terkait gender pemimpin atau atasan mereka. Namun, bagi individu yang memiliki preferensi, cenderung memilih pemimpin dengan gender yang sama. Perempuan lebih cenderung memilih pemimpin perempuan (22% perempuan dan 12% laki-laki), sedangkan laki-laki lebih cenderung memilih pemimpin laki-laki (26% laki-laki dan 17% perempuan) (Grant Thornton, 2023). Di Indonesia, mayoritas responden masih lebih memilih

dipimpin oleh laki-laki (49%) dibandingkan perempuan (12%), sementara 37% lainnya tidak memiliki preferensi tertentu. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat Indonesia menilai bahwa pemimpin laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama baiknya dalam menciptakan organisasi yang sukses secara finansial maupun inovatif.



Gambar 1. Perbandingan pekerja perempuan di Indonesia dan global

Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender melalui ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 serta penerapan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan partisipasi perempuan di sektor publik dan pemerintahan. Jika dibandingkan dengan rata-rata global, perempuan di Indonesia dinilai memperoleh perlakuan yang relatif lebih baik dalam institusi publik seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan tempat kerja.

Namun demikian, secara empiris masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis masih relatif rendah, baik dalam birokrasi pemerintahan maupun jabatan kepemimpinan publik. Selain itu, akses perempuan terhadap sumber daya publik dan kesempatan karier masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan budaya patriarki. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam administrasi publik masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen kebijakan pemerintah, laporan UN Women, serta regulasi terkait kesetaraan gender di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami implementasi kebijakan kesetaraan gender secara mendalam, termasuk tantangan dan efektivitas penerapannya dalam administrasi publik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Kesetaraan Gender di Indonesia

Kesetaraan gender di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia menurun dari 0,447 pada tahun 2023 menjadi 0,421 pada tahun 2024.

Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Namun, ketimpangan gender masih terjadi di beberapa daerah akibat perbedaan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.



Dalam bidang politik, keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia masih berada di bawah 30%. Data UN Women menunjukkan bahwa perempuan masih memiliki keterbatasan dalam menduduki jabatan strategis dan posisi pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan politik perempuan belum berjalan optimal.

Pada sektor ekonomi, data Sakernas BPS menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan tahun 2024 berada di kisaran 56%, sedangkan laki-laki mencapai lebih dari 84%. Selain itu, perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam dunia kerja masih cukup tinggi.

## 2. Kerangka Kebijakan Kesetaraan Gender di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung kesetaraan gender, salah satunya melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Kebijakan ini bertujuan mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Selain itu, kesetaraan gender juga menjadi bagian dari RPJMN dan didukung melalui Anggaran Responsif Gender (ARG). ARG digunakan untuk memastikan anggaran negara dapat memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil, seperti program kesehatan ibu dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Pemerintah juga memiliki berbagai regulasi perlindungan perempuan untuk mengurangi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih inklusif.

## 3. Implementasi Kebijakan dalam Administrasi Publik

Implementasi kebijakan kesetaraan gender dilakukan melalui penerapan PUG dalam perencanaan kebijakan publik. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal karena banyak instansi yang menjalankan PUG hanya sebagai formalitas administrasi tanpa analisis gender yang mendalam.

Dalam penerapan ARG, beberapa program pemerintah seperti kesehatan ibu-anak dan pemberdayaan UMKM perempuan sudah menggunakan pendekatan anggaran berbasis gender. Akan tetapi, implementasinya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman ASN mengenai penyusunan kebijakan responsif gender.

ASN memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan publik, tetapi pemahaman terkait isu gender masih belum merata. Pelatihan gender juga masih

terbatas di beberapa daerah sehingga implementasi kebijakan belum berjalan konsisten antarinstansi.

#### **4. Tantangan Implementasi**

Implementasi kebijakan kesetaraan gender masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi struktural, masih terdapat keterbatasan SDM dan anggaran dalam pelaksanaan program berbasis gender. Dari sisi kultural, budaya patriarki masih menyebabkan perempuan memiliki akses yang lebih rendah terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan.

Selain itu, koordinasi antarinstansi pemerintah belum berjalan optimal dan penggunaan data terpilah gender masih terbatas. Akibatnya, evaluasi kebijakan sering kali belum mampu menggambarkan kondisi laki-laki dan perempuan secara spesifik.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah menunjukkan perkembangan positif dalam kesetaraan gender, implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan komitmen pemerintah, peningkatan kapasitas ASN, dan perubahan budaya masyarakat agar tercipta administrasi publik yang lebih adil dan inklusif.

### **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam administrasi publik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup positif, terlihat dari menurunnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap kebijakan responsif gender. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan seperti Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG) untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif.

Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya patriarki, rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dan ketenagakerjaan, keterbatasan pemahaman ASN mengenai isu gender, serta belum optimalnya penggunaan data terpilah gender. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen pemerintah, peningkatan kapasitas birokrasi, dan dukungan masyarakat agar kesetaraan gender dapat terwujud secara lebih efektif dan merata.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan analisis implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam administrasi publik di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya secara lebih optimal dan berkelanjutan:

#### **1. Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pemerintah perlu memastikan seluruh instansi menerapkan PUG secara nyata, tidak hanya sebagai formalitas administrasi.

#### **2. Peningkatan Kapasitas ASN**

Pelatihan terkait kesetaraan gender perlu dilakukan secara rutin agar ASN mampu menyusun kebijakan yang responsif gender.

#### **3. Optimalisasi Anggaran Responsif Gender (ARG)**

Pemerintah perlu memastikan anggaran berbasis gender digunakan secara efektif untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan.

#### **4. Peningkatan Representasi Perempuan**

Diperlukan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam jabatan politik dan birokrasi.

#### **5. Penguatan Data Terpilah Gender**

Pemerintah perlu memperbaiki sistem data berbasis gender agar evaluasi

kebijakan lebih akurat dan tepat sasaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. 2024. *Indeks Ketimpangan Gender Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2024*. Jakarta: BPS.
- Bappenas. 2021. *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Dwiyanto, Agus. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Anggaran Responsif Gender*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2023. *Pembangunan Kesetaraan Gender di Indonesia*. Jakarta: KPPPA.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2018. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- UN Women. 2023. *Women in Politics Indonesia*. New York: UN Women.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).
- UNDP. 2023. *Human Development Report 2023*. New York: United Nations Development Programme.